



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
DINAS PERTANAHAN
DAN PENATAAN RUANG**

TAHUN 2022

**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021
Jalan Muso Bin Salim No.06, Tenggarong**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas izin- Nya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) perangkat daerah yang tertuang dalam Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan melalui kegiatan dan program pembangunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berperan sebagai alat kendali, dan wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang dalam rangka menuju good governance dalam tujuan tercapainya visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini, Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja di bidang pertanahan dan Penataan Ruang.

Kutai Kartanegara, Juli 2021
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG,



SETIANTO NUGROHO AIL, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671027 199403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tupoksi.....	3
1.4 Struktur Organisasi	3
BAB II EVAKUASI KINERJA.....	6
2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2021.....	6
2.2 Isu Strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
BAB III SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	11
3.2 Program dan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan halter sebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggung jawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara 1enyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1(satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini disusun mengacu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut ;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
18. Renstra Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

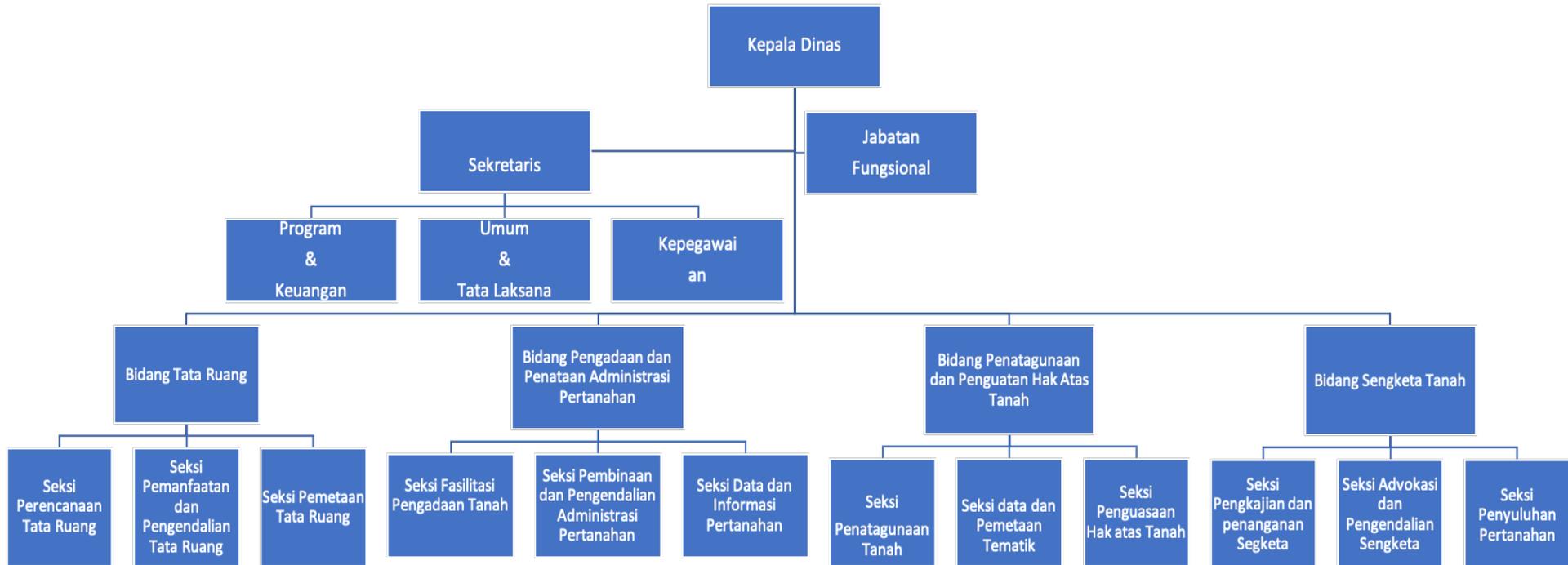
1.4 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari:

1. KepalaDinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - SeksiPerencanaan Tata Ruang
 - SeksiPemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - SeksiPemetaan Tata Ruang
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :
 - Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - Seksi Data dan Informasi Pertanahan

5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
 - Seksi Penatagunaan Tanah
 - Seksi Data dan Pemetaan Tematik
 - Seksi Penguatan Hak Atas Tanah
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
 - Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
 - Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
 - Seksi Penyuluhan Pertanahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB II

EVALUASI KINERJA

2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2021 mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 16.444.693.814,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 14.138.537.897,00 atau 85,98 %. Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Kerja keras dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai pencapaian target sasaran merupakan kunci sukses keberhasilan dan kelancaran program/kegiatan. Hasil evaluasi kinerja Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Evaluasi Kinerja dan CapaianCapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)
DinasPertanahan dan PenataanRuang Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan profesional di DinasPertanahan dan Penataan Ruang	Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)	41,83%	85%	73,29%	86,22%	85
2	Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara	95,83%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyuluhan sengketa pertanahan	0	9	0	0%	9

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2019	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
		Meningkatnya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat	50 %	75%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Kepala Daerah	30	1	1	100%	1

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dengan target sebesar 85 atau Predikat “A” berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan nilai 73,29 atau dengan Predikat “BB” atau capaian kinerja sebesar 86,22 % sedangkan pemeriksaan untuk Akuntabilitas Tahun 2021 belum dilakukan sampai dengan laporan ini dibuat. Jika dilihat dari realisasi, maka dapat dikatakan bahwa Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tidak memenuhi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Beberapa rekomendasi terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mejnjadi bahan masukan terhadap perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan, sehingga target yang ditetapkan atas nilai SAKIP pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun mendatang tercapai.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sebesar 75 dan realisasinya 75 atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi namun banyak faktor kendala dari indikator pada tahun 2021 yaitu masalah berbagai hal termasuk Masih tidak tertib administrasi pertanahan ditingkat Desa/kelurahan dan kecamatan serta Tidak sinkronnya data yang disajikan mengenai inventarisasi asset lahan Pemda yang diberikan BPKAD dengan kondisi lapangan sehingga mempersulit identifikasi lokasi masalah lain yaitu Dokumen tanah tidak lengkap, ukuran tanah berubah, dokumen tanah tidak ada, aset tanah Pemda digunakan pihak lain, tercatat di KIB tapi lokasi tidak, tanda patok batas tidak diketahui dan banyaknya data data penguasaan tanah yang tumpang tindih solusi /

rekomendasinya adalah Melakukan koordinasi dengan BPKAD dan seluruh pihak yang terkait .

- Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 yaitu Terlaksananya penyuluhan Sengketa Pertanahan di Kecamatan dengan target 9 kecamatan tidak dapat tercapai .Target kinerja tidak tercapai dikarenakan tidak adanya Penyediaan anggaran pada kegiatan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Tidak Konsistennya Proses Anggaran dalam hal Kegiatan penyuluhan Sengketa Pertanahan di Kecamatan solusi / rekomendasinya adalah Melakukan koordinasi dengan pihak Bappeda Kabupaten Kutai kartanegara terkait masalah Penyuluhan sengketa paertanahan.

- Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sebesar 20 kasus dan realisasinya 20 Kasus atau capaian kinerja sebesar 100 % . Target kinerja tercapai dari 20 Kasus sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat diselesaikan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu SDM kurang, sehingga pelayanan kurang maksimal dan Kurang tersedianya regulasi urusan sengketa tanah garapan solusi / rekomendasinya adalah Melakukan koordinasi dengan pihak terkait perihal penyusunan regulasi urusan sengketa tanah garapan.

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-3” tahun 2021 sebesar 1 Dokumen dan terrealisasi 1 dokumen atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kriteria Tinggi, Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu ada kesalahan dalam penganggaran RKA/DPA , dimana belanja modal tidak sesuai dengan tujuan kegiatan yang dimaksud sehingga kegiatan dilaksanakan pada saat APBD-P ,kemudian terdapat perubahan pedoman RDTR sehingga harus melakukan pembaharuan pedoman RDTR dari sebelumnya solusi/rekomendasinya adalah mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal kekuatan hukum atas pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi :

1. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garap
4. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
5. Program Penatagunaan Tanah
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
7. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

2.2 Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2017-2022) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Strength (Kekuatan)

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman Dan Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Atau Kerugian Yang Dapat Dinilai Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033.
- Sumber Daya Manusia
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

b. Weakness (Kelemahan)

- Terbatasnya/belum adanya Rencana Tata Ruang rinci (RDTR);
- Konsistensi terhadap perencanaan Penataan Ruang;
- Terbatasnya peta-peta tematik penunjang ke tata ruangan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
- Belum tersedianya sistem informasi pendukung pertanahan dan penataan ruang yang memadai;
- Masih kurangnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat;
- Belum adanya sinkronisasi rencana tata ruang pada wilayah perbatasan;
- Belum terintegrasinya data atau peta terhadap standarisasi nasional (data spasial nasional).

2. Lingkungan Eksternal

a. Opportunity (Peluang)

- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Adanya kerjasama pemkab dengan instansi vertikal dan dengan daerah lain (kabupaten/kota) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/Instansi lain.

di luar Pemda yang terkait dengan Pertanahan dan Penatan Ruang;

- Keterbukaan informasi publik (media untuk menyampaikan keluhan masyarakat).

b. Threats (Ancaman)

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan;
- Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
- Luas dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Belum terpolanya jaringan Infrastruktur dalam pengembangan wilayah.

BAB III

SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu kedepan. Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai target capaian untuk tahun yang bersangkutan.

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan kinerja (performance) yang secara berkala dievaluasi. Adapun sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2022	KETERANGAN
1	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan		Cakupan Pelayanan Pertanahan	60	
		Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	80	
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	
			Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	83	
			Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	
			Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	55	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2022	KETERANGAN
2	Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	65	
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target sasaran di atas Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan termasuk kegiatan rutin dengan total anggaran Rp 16.444.693.814,00 dengan rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan masing-masing indikator output dan outcome sebagaimana terinci dalam tabel 3.2. berikut.

Tabel3.2:
Program Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2022

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase	65	1.820.000.000
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	Persentase	10	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	Perda	1	150.000.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	Perbup	2	580.000.000
Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	1)Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2) Jumlah Penetapan Kebijakan terkait bangunan berijin dan tidak berijin	Dokumen	0	-
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-	Jumlah kecamatan yang sudah	Kecamatan	2	-

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
undangan Bidang Penataan Ruang	mendapatkan sosialisasi			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	Persentase	16,77%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	Dokumen	1	485.000.000
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Komunitas/Kelompok	Komunitas/ Kelompok	0	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase	4,89%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1) Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan, 2) Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang, 3) Jumlah kelurahan/desa yang melakukan konsultasi/supervisi	1) Berkas, 2) Dokumen, 3) Kelurahan/ Desa	1) 100 2) 0 3) 0	60.000.000
Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini	Persen	20	60.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	Persentase	6,87%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah Materi Teknis 2) Jumlah peraturan bupati tentang mengenai insentif dan disinsentif	1) Dokumen, 2) Perbup	1) 1 2) 0	200.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi 2) Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang	1) Berkas, 2) Aplikasi,	1) 50 2) 1	65.000.000
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	Berkas	20	150.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	20	70.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	12.251.906.166
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen	15	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen	10	75.000.000

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen	5	50.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan	12	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Laporan	76	7.871.245.382,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	2	286.120.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1	74.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	1	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	156	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	Dokumen	5	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan	7	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen insatalasi listrik	Jumlah Komponen	1	34.967.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	45	104.947.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). Jenis 2). Kotak, 3). Porsi	1). 7 2). 1200 3). 1000	170.545.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1) jenis 2) Lembar	1) 4 2) 36000	60.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	2790	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	15	245.815.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
	Daerah yang disediakan			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	5	215.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS, 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1) Orang, 2) Orang	1) 51 2) 8	1.203.305.484
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	13	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaran dinas	Unit	6	67.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	Unit	6	393.460.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	Gedung	1	1.200.000.000
	Terwujudnya Tataguna Lahan			
	Jumlah Data Penatagunaan Tanah			
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	Persentase	15	110.000.000
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal)	Dokumen	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Dokumen	1	110.000.000
	Jumlah Penyelesaian Kasus/Sengketa Tanah	Persentase		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persentase	80	275.000.000
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	22	
Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Tersedianya informasi rencana lahan pembangunan yg tdk bersengketa dan jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Dokumen	2	225.000.000
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	20	50.000.000
	Tercapainya Jumlah Lahan Yang di Bebaskan			
	Meningkatnya Jumlah Lahan Untuk Pembangunan			
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase	70	250.000.000
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dokumen	1	250.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit/Lokasi	5	-

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	Persentase	83	300.000.000
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum	Dokumen	2	
Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen	1	100.000.000
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Dokumen	0	-
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota	Dokumen	1	100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-
Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	Persentase	15	75.000.000
Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota	Dokumen	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	Dokumen	1	75.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	-
Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat	Dokumen	0	-
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tersedianya pengelolaan tanah kosong	Persentase	55	592.024.714
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	Dokumen	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong	Dokumen	1	60.000.000
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kegiatan	0	
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventariasasi tanah kosong	Dokumen	0	60.000.000

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
Pemanfaatan Tanah Kosong	1) Jumlah Dokumen, 2) Jumlah Tanah Aset Pemda yang difasilitasi untuk di Sertifikat (Peruntukan Penggunaan)	1) Dokumen 2) Lokasi	1) 1 Dokumen 2) 100 Lokasi	472.024.714
	Tertib Administrasi Pertanahan			
	Jumlah SKPT yang diterbitkan			
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persentase	82	150.000.000
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	1	150.000.000
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat			
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	0	-
	Terwujudnya Tataguna Lahan			
	Jumlah Data Penatagunaan Tanah			
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	Persentase	76	100.000.000
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	1	100.000.000
Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	0	-

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Dokumen	0	-

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 ini merupakan komitmen Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good' governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean' government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Kutai Kartanegara, Juli 2021
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kutai Kartanegara government. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA'. The inner part of the stamp contains the text 'DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SETIANTO NUGROHO AIL SH.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008